

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan
Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening**
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

ADEL RIVIANDO

14043065/2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

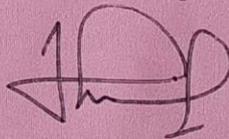
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)

Nama : Adel Riviando
NIM/TM : 14043065/2014
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

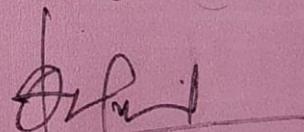
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)

Nama : Adel Riviando

Nim/TM : 14043065/2014

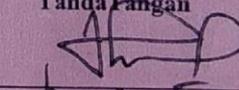
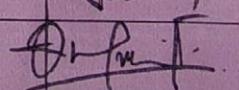
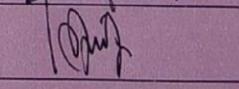
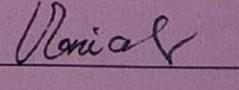
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	1. 
2	Sekretaris	: Halmawati, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. 
4	Anggota	: Vanica Serly, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adel Riviando
NIM / Th. Masuk : 14043065 / 2014
Tempat / Tanggal Lahir : Koto Baru / 20 September 1994
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Tanjung, Nagari Pandai Sikek, Kec. X
Koto
No. Hp / Telephone : 0822 8815 8303 / 0815 3454 8464
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja
Modal Sebagai Variabel Intervening

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang,

2019



Adel Riviando

NIM : 14043065 / 2014

ABSTRAK

Adel Rivianto (14043065). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Pembimbing 1: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing 2: Halmawati, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh PAD, DAU dan DAK pada IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel Intervening. Ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada 2015-2017. Variabel PAD diukur dengan rumus $PAD = \% \text{ alokasi membentuk HDI} \times \text{total PAD}$, variabel DAU diukur dengan rumus $DAU = \% \text{ alokasi membentuk HDI} \times \text{total DAU}$, variabel DAK diukur rumus $DAK = \% \text{ alokasi pembuat HDI} \times \text{total DAK}$, variabel Pengeluaran Modal diukur dengan $\text{Pengeluaran Modal} = \% \text{ alokasi HDI pembentuk} \times \text{total Pengeluaran Modal}$ dan HDI diukur melalui rata-rata 3 komponen membentuk HDI. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode total sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.bps.go.id dan www.djpk.depkeu.go.id. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK memiliki efek positif yang signifikan terhadap HDI, Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD, DAU dan DAK pada HDI.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Abstract

This research aims to prove empirically the influence of PAD, DAU and DAK on the HDI with Capital Expenditure as an Intervening variable. This is quantitative descriptive research. The population in this research were 19 districts and cities in the Province of West Sumatra in 2015-2017. The PAD variable is measured by the PAD formula $= \% \text{ allocation forming the HDI} \times \text{total PAD}$, the DAU variable measured by the DAU formula $= \% \text{ allocation forming the HDI} \times \text{the total DAU}$, the DAK variable measured DAK formula $= \% \text{ allocation of HDI maker} \times \text{total DAK}$, variable Capital Expenditures measured by Capital Expenditure $= \% \text{ allocation of HDI formers} \times \text{total Capital Expenditures}$ and HDI measured through the average of 3 components forming the HDI. Samples in this study were determined by the total sampling method. The type of data used is secondary data obtained from www.bps.go.id and www.djpk.depkeu.go.id. The analytical method used is Partial Least Square. The results of this study shows that PAD, DAU and

DAK have a significant positive effect on the HDI, Capital Expenditures are not able to mediate the influence of PAD, DAU and DAK on the HDI.

Keywords: Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Capital Expenditures, Human Development Index (HDI).

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Ganefri, Ph.D., Rektor Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu dan memperoleh pendidikan di Universitas Negeri Padang.
2. Drs. Idris, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam pelaksanaan perizinan penelitian.
3. Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam pelaksanaan perijinan penelitian.
4. Henri Agustin, S.E., M.Sc, Ak dan Halmawati, S.E., M.Si, Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
5. Ayah (Rinaldi) dan Ibu (Gusniarti), Kakak (Lusiana Martha), Uda (Oka Mulyadi), Ponakan (Syauqi Abidzar Ramadhan) Egif Fofriyon (Anak), serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi serta dukungan moril dan materil.

6. DPH dan Pengurus HMJ Akuntansi FE UNP Periode 2015-2016 dan periode 2016-2017 (Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang)..
7. Bagus Saputra (teman sekamar yang sekaligus jadi pembimbing revisi di kos), Hafizul Haq (tetangga sebelah kamar yang selalu jadi tempat bimbingan skripsi di kos dan di rumah), Yuhardiansyah (teman yang bersedia sibuk membantu dalam proses pengerjaan skripsi, Ridwan Muslim (teman yang telah membantu dalam mngerjakan skripsi.
8. Sahabat PARDI (Ramdani Saputra, Andria Fauzi, Fahrul Rozi, Hendri Jony) yang telah memberi semangat dan menghibur penulis selama proses penyelesaian skripsi.
9. Sahabat GALADIA skuad (Bagus Saputra, Hafizul Haq, Gustiman Candra, Isfan Fajar Satia, Armanto Rahmat, Rima Kurnia, Yurisdicctie Contentia Kharisma, Alisha Ramadani Isni, Tessa Sanjaya, Vany Maulina Renandi) yang telah menjadi sahabat yang paling gila dan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Kos ASTAM (Tio Amri Pratama Citut, Hafizul Haq ga jelas, Bagus Saputa Gemulai, Shabran Jamil Penikung, Yuhardiansyah Bucin, Bima Perdana Putra Jones, Rahmatmah Fauzi laki-laki serius, Ridho Dwi Perosa Mulut Besar, Hanafi Taufiqur Rahman HSFCI Payakumbuh dan Astam Squad) yang telah memberikan dukungan, semangat dan menghibur penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Senior dan Junior Kos Astam (Armedi, Yudha Anugrah F, Nikasakazaki, Ulmi Ilham, Asadullah Abdul Qohar, Riski, Baro, M. Iqbal, Kudan, Daffa)
12. Terima kasih kepada kak Fathia yang telah memberikan banyak ilmu dan sarannya dalam proses penulisan skripsi.
13. Terima kasih untuk Lisa Assari (si Telur Gulung kesayangan) yang selalu tau suka dan duka dalam proses penyusunan skripsi ini, serta telah menjadi tempat pelampiasan di kala suasana hati baik dan buruk saat bimbingan. Serta jadi penasehat terbaik dikala banyak masalah dalam proses penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman satu pembimbing yang telah memberikan informasi dari pembimbing.
15. Teman-teman mahasiswa akuntansi angkatan 2014 yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana yang saling memotivasi, memberikan saran, semangat, dan dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Terima kasih kepada Bang Jep Plaza Computer yang telah membantu mngembalikan data skripsi saya yang terhapus.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini telah disusun sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang, Namun Kritik, saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas skripsi ini akan diterima dengan besar hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 .Latar Belakang	1
1.2 .Rumusan Masalah	8
1.3 .Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTEISIS	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.3 Dana Perimbangan	14
2.1.3.1 Dana Alokasi Umum.....	15
2.1.3.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum	15
2.1.3.1.2 Alokasi Dana Alokasi Umum.....	15
2.1.3.1.3 Tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum	16
2.1.3.1.4 Metode Perhitungan Dana Alokasi Umum.....	17
2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus.....	18
2.1.3.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus	18
2.1.3.2.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	19
2.1.3.2.3 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus	20
2.1.3. Dana Bagi Hasil	23
2.1.4 Belanja Modal	23
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Hipotesis Peneliitian	32
2.3.1 PAD Terhadap IPM.....	32
2.3.2 DAU Terhadap IPM.....	34
2.3.3 DAK Terhadap IPM.....	35
2.3.4 PAD Terhadap IPM Melalui Belanja Modal	37

2.3.5	DAU Terhadap IPM Melalui Belanja Modal.....	39
2.3.6	DAK Terhadap IPM Melalui Belanja Modal.....	41
2.4	Kerangka Konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Jenis Penelitian.....	45
3.2	Populasi dan Metode Pengambilan Sample	45
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4	Metode Pengambilan Data	46
3.5	Variabel Penelitian.....	46
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	47
3.7	Metode Analisis	52
3.7.1	Metode Pengukuran (Outer Model)	53
3.7.1.1	Indikator Reliability & Internal Consistency Reliability	53
3.7.1.2	Convergent validity & Diskriminant Validity	53
3.7.2	Model Struktural (Inner Model).....	54
3.7.2.1	Koefisien Determinant (R^2)	54
3.7.2.2	F^2 Untuk <i>Effect Size</i>	55
3.7.2.3	<i>Path Coefficient</i> (Uji Hipotesis).....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.2	Hasil Penelitian	57
4.2.1	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	57
4.2.1.1	<i>Uji Indicator Reliability & internal consistency</i>	57
4.2.1.2	<i>Uji Convergent Validity & Discriminant Validity</i>	57
4.2.2	Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	59
4.2.2.1	Koefisien determinant (R^2)	59
4.2.2.2	<i>Effect Size</i> (F^2).....	59
4.2.2.3	<i>Prediction Relevance</i> (Q^2).....	60
4.2.2.4	<i>Path Coefficient</i> (Uji Hipotesis).....	61
4.3	Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan Penelitian	76
5.3	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ikhtisar Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Daftar Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.....	56
Tabel 4.2 <i>Uji indicator reliability & internal consistency</i>	57
Tebel 4.3 Uji Diskriminan Validitas	58
Tabel 4.4 <i>Multicollinearity</i>	58
Tabel 4.5 Uji Koefisien determinasi (R^2).....	59
Tabel 4.6 <i>Effect Size</i>	59
Tabel 4.7 <i>Blindfolding</i>	60
Tabel 4.8 Uji Hipotesis	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	44
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indeks Pembangunan Manusia 2015/2017	82
Lampiran 2 Pendapatan Asli Daerah 2015.....	83
Lampiran 3 Pendapatan Asli Daerah 2016.....	84
Lampiran 4 Pendapatan Asli Daerah 2017.....	85
Lampiran 5 Dana Alokasi Umum 2015	86
Lampiran 6 Dana Alokasi Umum 2016	87
Lampiran 7 Dana Alokasi Umum 2017	88
Lampiran 8 Dana Alokasi Khusus 2015	89
Lampiran 9 Dana Alokasi Khusus 2016	90
Lampiran 10 Dana Alokasi Khusus 2017	91
Lampiran 11 Belanja Modal 2015.....	92
Lampiran 12 Belanja Modal 2016.....	93
Lampiran 13 Belanja Modal 2017.....	94
Lampiran 14 Outer Model.....	95
Lampiran 15 Inner Model	96

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu dari modal penting dalam menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik kedepannya. Manusia sebagai salah satu dari objek pembangunan ekonomi, manusia juga merupakan salah satu subjek penting dalam tujuan pembangunan ini. Dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disana tercantum tujuan bernegara yaitunya “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Peningkatan sumber daya manusia mempunyai makna peningkatan kapasitas dasar penduduk, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan modal yang paling penting dalam pembangunan yang akan berperan aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengatur seberapa besar pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas lagi dibanding sebelumnya baik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi (Christy dan Priyo Hari Adi, 2009). Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM

dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (www.bps.go.id). Ketiga unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain dari tiga aspek tersebut, IPM juga dipengaruhi oleh aspek ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan dan pemberantas kemiskinan. Ini semua tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) hadir sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja suatu negara. Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh *Amartya Sen*, seorang pemenang nobel dari India dan *Mahbud ul Haq*, seorang ekonom dari Pakistan yang di bantu oleh *Meghnad Desai* dari *London School of Economics* dan *Gustav Ranis* dari *Yale University* (Todaro, 2011).

Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi saja karena pertumbuhan ekonomi tersebut baru merupakan syarat perlunya. Agar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi tersebut harus disertai dengan syarat yang cukup, yaitu pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil dari pembangunan

tersebut. Berdasarkan pengalaman pembangunan dari berbagai negara lain, diperoleh pelajaran yang penting bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai (Marhaeni, dkk, 2008).

Brata (2005) menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, investasi swasta dan distribusi pendapatan proksi Indeks Gini terhadap IPM dalam konteks regional (antarprovinsi) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia, variabel investasi swasta berpengaruh negatif terhadap IPM dan variabel Indeks Gini berpengaruh positif terhadap IPM.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia diperlukan dana atau anggaran untuk pembangunan daerah tersebut. Saat ini di Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi (otonomi daerah) yang menggantikan model dari sentralisasi, yang salah satu dari aspek penting dalam pengadopsian sistem desentralisasi ini adalah desentralisasi fiskal. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyebutkan penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan

Sumber dari penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan untuk menanggung sebagian beban belanja daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu (Darise, 2009:48). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PAD, bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi.

Sumber penerimaan daerah yang kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU), dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan bantuan yang bersifat blok (*block grants*). Selain itu, Dana Alokasi Umum sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Lugastoro, 2013).

Sumber dana yang menjadi penerimaan daerah selanjutnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Tujuan penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang harus dituntaskan.

Christy dan Adi (2009) meneliti kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah (2004-2006) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwasanya Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya, Syahril (2011) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian lain yang serupa yang dilakukan oleh Lugastoro (2013) di Jawa Timur menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Setyowati dan Suparwati (2012), menemukan bahwasanya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), sedangkan DAU, DAK dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diprosikan dengan Belanja Modal terbukti berpengaruh positif terhadap (IPM).

Selain penelitian tentang IPM, juga terdapat penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian Belanja Modal

yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), dimana Darwanto dan Yustikasari (2007) menyimpulkan bahwa hanya PAD dan DAU yang berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Sedangkan Darmayasa (2014) menemukan bukti empiris bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal namun belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Jiwatami (2013) menemukan juga bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal namun DAK berpengaruh positif.

Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang mengenai pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Upaya perbaikan penelitian ini juga dilakukan dengan memperbaharui tempat penelitian dan model penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan melakukan penelitian di wilayah pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dan dengan melakukan penelitian pengaruh langsung dan tidak langsung variabel PAD terhadap IPM melalui Belanja Modal sebagai pemediasi. Sedangkan untuk variabel DAU penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2011) hanya meneliti pengaruh langsung DAU terhadap IPM, karena penelitian mempertimbangkan bahwa DAU ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini beralasan karena DAU merupakan salah satu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang alokasinya cenderung bukan untuk pembangunan infrastruktur daerah itu sendiri (Jiwatami dan Wandira, 2013). Hasil penelitian terdahulu lainnya (Raviyanti, 2017; Setyowati,

2012; Christy, 2009) menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh DAU terhadap IPM melalui Belanja Modal. Unit analisis dari penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dipilih karena menurut data dari republika.co.id menunjukkan bahwasanya angka IPM untuk Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan bahkan IPM dari Provinsi Sumatera Barat ditahun 2017 melebihi angka IPM rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia daerah saat itu adalah sebesar 70,73, berada pada rata-rata Indeks Pembangunan Manusia nasional sebesar 70,18. Penulis tertarik untuk mengetahui ketiga faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Barat. Dengan diketahuinya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan IPM di Provinsi Sumatera Barat, maka daerah lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman dan acuan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berujung pada meningkatnya angka IPM pada daerah tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM secara langsung dan tidak langsung melalui BM. Sehingga pertanyaan riset yang diajukan dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai variable intervening?
5. Apakah Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai variable intervening?
6. Apakah Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebagai variable intervening?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari PAD, DAU dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Belanja Modal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan bukti empiris dan melengkapi literatur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga-lembaga terkait dalam bagaimana menentukan kebijakannya yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), masalah keagenan dapat muncul karena setiap individu diasumsikan akan mempunyai preferensi untuk memaksimalkan utilitas pribadi yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan individu lain. Permasalahan hubungan keagenan ini dapat mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (*informasi symmetry*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Menurut Scott (2011), asimetri informasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan suatu jenis asimetri dimana salah satu pihak terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lainnya tidak memiliki manfaat informasi yang sama. Hal dapat dilakukan oleh seorang manajer atau orang dalam perusahaan dengan mengendalikan penyerahan informasi itu kepada investor sesuai dengan kepentingannya. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan *adverse selection*, seorang manajer haruslah menyebarkan informasi dalam kepada pihak lain secara bersamaan dan merata. Sedangkan *moral hazard* adalah suatu jenis asimetri informasi dimana ada pihak yang terkait dengan transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan.

Pemilik dan kreditor tidak mungkin dapat secara langsung mengamati berjalannya transaksi perusahaan. Untuk mengendalikan *moral hazard* ini terdapat

dua acara, yaitu: (1) laba bersih dapat dijadikan sebagai dasar penentuan seberapa besar kompensasi manajer dan (2) laba bersih ini juga dapat menggambarkan bagaimana kondisi pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja perusahaan sehingga manajer yang lalai akan menyebabkan laba bersih perusahaan menurun, reputasi manajer yang jelek dan nilai dari pasar sekuritas menurun. Asimetri informasi itu sendiri akan dapat menyebabkan munculnya masalah fundamental teori keuangan, yaitu bagaimana melakukan rekonsiliasi perbedaan relevansi dan reliabilitas informasi akuntansi. Informasi yang relevan adalah informasi yang membuat investor mampu menilai prospek ekonomi di masa yang akan pada suatu perusahaan. Sedangkan informasi yang reliabel adalah informasi yang bebas dari bias atau menipu seorang manajer.

Kaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

Selain dari itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal memberikan sumber daya

kepada daerah dengan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan sebagainya demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014, yaitu:

1. Hasil pajak daerah yaitunya pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sendiri sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2. Hasil dari retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah yaitu pungutan yang telah secara sah telah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternative untuk tidak mau membayar, merupakan pungutan yang bersifat budgetairnya tidak menonjol. Dalam hal tertentu, retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota dari masyarakat daerah itu sendiri.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetorkan ke kas pemerintah daerah, baik perusahaan yang dipisahkan, sesuai dengan motif dari pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak, retribusi daerah dan pendapatan dinas.

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan suatu daerah dalam bidang tertentu.

2.1.3 Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan ialah suatu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan suatu konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh otonomi daerah.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat daerah tersebut. Pemberian sumber keuangan kepada pemerintah daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Keseimbangan inilah yang akan menjadi jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dana perimbangan ini dibagi menjadi:

2.1.3.1 Dana Alokasi Umum

2.1.3.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang mendapat alokasi anggaran transfer dari Pemerintah Pusat. Pada dasarnya jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) transfer tanpa syarat (*unconditional grants, general purpose rant, block grant*), (2) transfer dengan syarat (*conditional grant, categorical garnt, specific purpose grant*).

DAU ini berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. DAU ini juga sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) dikarenakan DAU merupakan jenis transfer antartingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

2.1.3.1.2 Alokasi Dana Alokasi Umum

1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Besaran DAU ditetpkan sekurang-kurangnya 26% dari hasil Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yangtelah ditetapkan APBN.
3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.1.3.1.3 Tahap Perhitungan Dana Alokasi Umum

1. Tahapan akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independensi dari berbagai Universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan undang-undang dan karakteristik Otonomi Daerah di negara Indonesia.

2. Tahapan administratif

Dalam tahapan ini depkeu c.p. DJKN berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan teknis

Merupakan tahapan dimana pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula dari DAU itu sendiri sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan politis

Merupakan tahapan akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU itu sendiri.

2.1.3.1.4 Metode Perhitungan DAU

1. Formula dari DAU ini menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar (AD) berupa gaji PNS daerah.

Rumus Formula DAU

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana:

$$\text{AD} = \text{Gaji PNS Daerah}$$

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

2. Alokasi Dasar (AD)

Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan relisasi gaji PNS tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

3. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan lokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah diitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

2.1.3.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.2.1 pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN,

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dalam pasal 40 UU No. 33 tahun 2004 pemerintah menetapkan 3 kriteria DAK yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ini ditetapkan dengan mempertimbangkan peraturan Perundang-undangan dan karakteristik daerah, sedangkan kriteria teknis ini ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis.

Dana Alokasi Khusus termasuk kedalam jenis transfer dengan syarat (*conditional transfer*). Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus juga dapat disebut dana infrastruktur dikarenakan merupakan Belanja Modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang lebih Panjang. Namun dalam situasi tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu dalam periode terbatas.

2.1.3.2.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

1. Kriteria pengalokasian DAK

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS.

- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c. Kriteria Teknis, ini disusun berdasarkan indikator yang dapat menggambarkan bagaimana kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan DAK didaerah.
2. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan.
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
 3. Penentuan daerah tertentu harus menerima kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
 4. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
 5. Alokasi DAK perdaerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3.2.3 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

1. DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (WAJAR) pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukan bagi SD baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan daerah pesisir .
2. DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB): meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya termasuk poskesdes dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

3. DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkauan dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan menurunkan angka kelahiran dan seberapa besar angka laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan regional.
5. DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan

kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, sampah dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
7. DAK pertanian, yang di gunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian ditingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahaan pangan nasional.
8. DAK Kelautan dan Perikanan, digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pembardayaan diwilayah pesisir.
9. DAK Prasarana Pemeritahan Daerah, yang digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran dan dipriortaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembanngunan/perlunasan/rehabilitas total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.
10. DAK Lingkungan Hidup, yang digunakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang lingkungan hidup

melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

11. DAK kehutanan, yang digunakan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.
12. DAK sarana dan prasarana pedesaan yang digunakan untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di pedesaan ke daerah pemasaran.
13. DAK perdagangan, digunakan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir.

2.1.3.3 Dana Bagi Hasil

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, dana bagi hasil (DBH) adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama pemberian DBH ialah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara

pemerintah pusat dan daerah. DBH itu sendiri dapat bersumber dari pendapatan pajak dan sumber daya alam. DBH ini adalah dana perimbangan yang bersifat *block grants* seperti halnya DAU sehingga pengelolaan maupun penggunaannya merupakan wewenang penuh dari pemerintah daerah. Khusus untuk BDH, istilah *block grants* sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (*earmarking*). Komponen tersebut antara lain BDH Kehutanan yang berasal dari Dana reboisasi yang digunakan untuk RHL (rehabilitas hutan dan lahan).

2.1.4 Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada pasal 53 ayat 2 Permendagri No 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwa nilai aset tetap berwujud yang di anggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai tersebut siap digunakan. Selanjutnya dalam pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di sana dijelaskan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal jumlah kapitalisasi sebagai dasar pembebanan

Belanja Modal, selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang bersifat rutin.

Ketentuan ini sejalan dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) khususnya PSAP No.7 Yang membahas tentang akuntansi tetap. Menurut SAP, Pengertian Belanja Modal ialah suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap/inventaris yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi itu sendiri, di sana juga termasuk pengeluaran biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam SAP, Belanja Modal dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori:

1. Belanja Modal Tanah

Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian, penyelesaian, balik nama atau sewa tanah, pengosongan, pengurangan, pemetaan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah di maksud dalam kondisis siap pakai

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. BM Gedung dan Bangunan

Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan pengawasan serta pengelolaan pembangunan dan bangunan yang menambah kapasitas semua gedung dan bangunan dimaksud siap untuk dipakai.

4. BM Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini ialah Belanja Modal kontrak sewabeli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.5 Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (Marhaeni, et al, 2008). Indikator dari angka harapan hidup ini menjelaskan dimensi umur panjang dan sehat. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah ini menggambarkan *output* dari dimensi dari pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli yang digunakan dalam mengukur dimensi hidup layak. IPM ini dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia

yang lebih rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). Perlu diketahui ternyata IPM mengukur tingkat pembangunan manusia ini secara relative, bukan absolut.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran pencapaian pembangunan berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen, yaitu harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam kesehatan, keaksaraan dan rata-rata lama keberhasilan sekolah dalam pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat untuk melihat kebutuhan dasar dilihat dari perpendekatan pengeluaran pendapatan perkapita yang mengukur keberhasilan di bidang pembangunan untuk kehidupan yang layak.

Menurut *Human Development Report* (1990), perkembangan manusia adalah proses memperbesar pilihan orang ("suatu proses memperbesar orang"). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk merupakan kekayaan riil suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang menekankan hanya pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pengembangan harus dianalisis dan dipahami dari sudut pandang manusia, tidak hanya dari pertumbuhan ekonominya. Seperti dari *Human Development Report* (1995), sejumlah tempat penting dalam pembangunan manusia meliputi:

1. Pembangunan harus memprioritaskan populasi sebagai pusat perhatian.

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara keseluruhan dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pengembangan manusia tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan manusia tetapi juga pada upaya untuk memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar utama, yaitu: produktivitas, kesetaraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.
4. Pembangunan manusia membentuk dasar untuk menentukan tujuan pengembangan dan menganalisis *opsi* untuk mencapainya.

Secara umum, metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia mirip dengan metode perhitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

1. Harapan hidup saat lahir.
2. Indeks pendidikan, diukur dengan rata-rata panjang sekolah (rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh orang yang berusia 15 tahun ke atas di semua tingkat pendidikan formal) dan Latin atau tingkat melek huruf lainnya untuk orang yang berusia 15 tahun atau lebih.
3. Indeks standar hidup yang layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP-Purchasing Power Parity).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ikhtisar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Temuan
----	---------------	-------	--------

1	Christydan Adi (2009)	Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia	DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia
2	Syahril (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah Juga berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3	Setyowati dan Suparwati (2012)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), sedangkan DAU, DAK, PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks

			Pembangunan Manusia (IPM)
4	Lugastoro (2013)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM di Jawa Timur	PAD dan DAK terhadap IPM berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM
5	Adiputra <i>et al</i> (2014)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	PAD berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali. PAD tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja daerah kabupaten/kota di Bali. Sedangkan SiLPA melalui alokasi belanja modal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada daerah kabupaten/kota di Bali. Sementara itu DAU, DAK dan DBH belum mampu mempengaruhi kualitas pembangunan manusia karena tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai belanja modal

6	Raviyanti <i>et al</i> (2017)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. DAK tidak berpengaruh terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening
7	Sumardjoko (2014)	Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening.	Dana otonomi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal APBD Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat periode tahun 2002-2012, belanja modal berperan sebagai variabel intervening dalam memberikan pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia

Penelitian terdahulu dari Christy dan Adi (2009) DAU mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal serta Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. Syahril (2011) Pendapatan Asli Daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Setyowati dan Suparwati (2012) DAU, DAK, PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lugastoro (2013) PAD dan DAK terhadap IPM berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Adiputra et al (2014) PAD berpengaruh secara langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Bali. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia melalui Alokasi Belanja daerah kabupaten/kota di Bali. Sementara itu DAU, DAK dan DBH belum mampu mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia karena tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai Belanja Modal. Raviyanti et al (2017) PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Dana alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan asli daerah digunakan sebagai alat ukur tingkat kemandirian daerah dalam sistem desentralisasi saat sekarang ini. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari dalam daerah sangatlah tergantung ada kemampuan daerah tersebut untuk merealisasikan potensi-potensi ekonomi daerah menjadi sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan perguliran dana yang bisa digunakan untuk

pembangunan yang berkelanjutan. (Darwanto dan Yustikasari, 2007). PAD merupakan suatu pendapatan daerah yang dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. PAD ini haruslah benar-benar dapat digunakan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan pendapatan asli daerah ini juga berasal dari masyarakat. Saat kualitas pelayanan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang di harapkan maka masyarakat akan malas membayar pajak, retribusi, dan lain-lain. Tetapi saat masyarakat menerima pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan harapan, masyarakat itu tidak akan enggan untuk membayar pajak, retribusi, dan lainnya tersebut.

PAD ini bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang. Alokasi dari PAD digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. Pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat akan kembali dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dalam angka IPM. Sehingga dapat di simpulkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat maka akan berbanding lurus dengan peningkatan IPM daerah tersebut

Lugastoro (2013) menyatakan bahwasanya PAD memiliki sebuah keunikan tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan seperti halnya DAK karena kewenangan pengelolaan PAD ini diserahkan sepenuhnya

kepada daerah, juga tidak membutuhkan koordinasi dengan pihak lainnya seperti pusat dan swasta. Seperti juga dinyatakan oleh Lugastoro (2013) dan Ardiansyah *et al* (2014) bahwasanya PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hiptesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.3.2 Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemampuan keuangan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan di daerahnya tidaklah sama setiap daerahnya, sehingga menyebabkan ketimpangan setiap daerahnya. Pemerintah pusat telah mendistribusikan dana perimbangan sebagai salah satu upaya demi mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan di setiap daerahnya. Salah satu dari dana perimbangan ini adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 tahun 2004). Penggunaan DAU ini diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Jadi prioritas utama daerah bukan hanya sekedar alokasi yang tinggi bagi kemajuan daerah yang dilihat dari kekayaan daerah tersebut, tetapi juga bagaimana pengalokasian dana yang

tinggi untuk belanja bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Setyowati dan Suparwati, 2012).

Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAU digunakan untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diatur pemerintah pusat dengan tujuannya untuk meningkatkan pelayanan daerah kepada masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya DAU tersebut bermuara juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana ketika kesejahteraan masyarakat meningkat maka juga akan meningkatkan angka IPM pada daerah tersebut.

Hasil penelitian Ardiasyah *et al* (2014) menyatakan jika variabel DAU merupakan variabel yang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi 0,981. Sementara itu Setyowati dan Suparwati (2012) menemukan jika DAU berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.3.3 Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu dari berbagai jenis dana perimbangan yang berguna sebagai pelengkap dana perimbangan lainnya seperti DAU dan DBH. Namun, seiring berjalannya waktu komponen Dana

Alokasi Khusus menjadi sangat penting guna mendanai pembangunan daerah karena proporsi DAU hanya cukup untuk mendanai belanja birokrasi saja seperti belanja pegawai. Pemamfaatan DAK oleh pemerintah daerah tetap diatur pengelolaannya oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan lainnya agar pemamfaatan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan publik. Pada tahun 2007 penggunaan DAK telah meliputi 7 bagian bidang pelayanan pemerintah yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum (jalan, irigasi, dan air bersih), prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, dan lingkungan hidup (Setyowati dan Suparwati, 2012). DAK sangat diharapkan mampu meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja modal daerah tersebut.

Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang digunakan untuk kebutuhan daerah pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk mendanai kegiatan khusus pemerintah daerah yang menjadi prioritas bagi pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengalokasikan ini melalui pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat terkait ketiga faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian IPM setiap tahunnya.

Hasil dari penelitian ardiansyah *et al* (2014) menyatakan jika variabel DAK ini merupakan variabel yang berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi 0,013 dan nilai koefisiennya sebesar -2,554. Penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) memberikan hasil yang

berbeda dari penelitian Ardiansyah *et al* (2014) dimana DAK ini berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah ialah merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting bagi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Tujuan dari PAD ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah itu sendiri terhadap pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya PAD ini dapat meningkatkan kadar dari otonomi daerah. PAD merupakan suatu pendapatan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri dan juga suatu daerah tersebut haruslah memiliki pendapatan daerah yang bergantung terhadap pemerintah pusat dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya(Wijaya, 2007).

Realisasi dari pengalokasian PAD ini disalurkan untuk pembangunan daerah seperti sarana prasarana transportasi tempat ibadah

dan pembangunan lainnya yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Besar kecilnya dana PAD pada suatu daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD yang merupakan pendapatan bebas daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba BUMD, penerimaan dinas dan penerimaan lain-lain yang digunakan untuk belanja pembangunan/belanja modal daerah, sedangkan belanja rutin daerah berasal dari penerimaan negara dari RAPBD. PAD setidaknya dapat digunakan untuk pembangunan jalan raya yang sumber dari dananya dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, selain itu pembangunan fasilitas kesehatan bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini dimensi umur panjang dan sehat dalam IPM dapat tercapai dengan membangun fasilitas kesehatan.

Selaras dengan hasil penelitian Syahril (2012) menyimpulkan bahwasanya PAD secara parsial dan simultan bersama Belanja Modal, signifikan mempengaruhi IPM. Christy dan Priyo (2009) dan Setyowati dan Yohana (2010) menyimpulkan bahwasanya Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, Sumiyati (2011) dan Syahril (2011) menyimpulkan hal berbeda bahwasanya Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Dari penelitian terdahulu diatas dapat kita lihat bahwasanya IPM itu sendiri dapat dipengaruhi oleh Belanja Modal. Apabila PAD disuatu daerah tinggi, maka akan mampu membiayai belanja modal yang cukup besar.

Dengan demikian, kualitas pembangunan manusia akan meningkat pula, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan IPM. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kemampuan PAD dalam membiayai Belanja Modal maka akan dapat meningkatkan IPM. PAD secara umum mempengaruhi belanja modal, walaupun dalam penelitian lain terdapat perbedaan hasil penelitian bahwa PAD tersebut berhubungan erat terhadap Belanja Modal. Berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis

H4: Belanja modal memediasi pengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

2.3.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan daerah itu sendiri. Berkaitannya dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal tersebut terjadi sebagai wujud dari pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagai dampaknya akan ada transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan sehingga pemerintah daerah itu bisa dengan leluasa mengelola sendiri dana tersebut apakah untuk kesejahteraan masyarakat atau keperluan yang lainnya (Darwanto dan Yustikasari,2007). Penggunaan dana ini diharapkan guna keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan utama dari otonomi daerah. Saat kondisi masyarakat

menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan juga meningkat. Ini ditunjang dengan penggunaan DAU yang sangat tepat pengalokasiannya terhadap Belanja Modal pemerintah dengan membangun sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat. Jadi saat ini bukan sekedar alokasi DAU yang tinggi bagi kemajuan daerah yang dilihat dari kekayaan, melainkan apakah pengalokasian DAU yang lebih tinggi untuk belanja pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga IPM daerah itu berada diatas angka rata-rata nasional.

Hasil penelitian Christy dan Priyo (2010) serta juga Oktora dan pontoh (2013) menyimpulkan bahwasanya variabel Dana Alokasi Umum ini berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, Wandira (2013) membuktikan bahwasanya DAU ini berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel Belanja modal. Namun hal sebaliknya dikemukakan oleh Maiharyanti (2010) menyatakan bahwasanya koefisien DAU ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal.

Setyowati dan Suparwati (2012) menemukan bahwasanya DAU ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal. Namun hal yang bertentangan ditemukan oleh Siswandi (2015) menemukan bahwasanya DAU ini tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui Belanja Modal.

Dari penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwasanya DAU ini berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan IPM. DAU dialokasikan salah satunya untuk membiayai Belanja Modal. Semakin besar

kemampuan DAU dalam membiayai Belanja Modal, maka akan meningkatkan IPM. Sehingga dari penelitian terdahulu tersebut diharapkan bahwasanya variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H5: Belanja Modal Memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia

2.3.6 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal

Dalam kaitannya dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fungsi Dana Alokasi Khusus ini sebenarnya hanya sebagai pelengkap dan penambah dari dana perimbangan yang lainnya. Dalam perkembangannya, keberadaan DAK ini menjadi suatu hal yang sangat penting sekali bagi pembangunan di daerah. Ini disebabkan oleh komponen utama dari dana perimbangan ini DAU hanya cukup kebutuhan belanja birokrasi saja. Sehingga penggunaan DAK inilah menjadi faktor penting bagi pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya (Usman dkk,2008).

Semenjak dimulainya pelaksanaan desentralisasi dan sekaligus otonomi daerah pada tahun 2001 cakupan dari DAK ini bertambah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 penggunaan DAK mencakup 7 bidang pelayanan pemerintah, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup. Tujuan dari DAK ini adalah mengurangi kesenjangan

keuangan antara daerah lainnya. Selain dari penunjang penerimaan pemerintah daerah, DAK juga berperan sebagai peningkatan kapasitas Belanja Modal pemerintah daerah yang cenderung tiap tahunnya meningkat (Usman dkk, 2008).

Dana Alokasi Khusus diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah supaya bisa meningkatkan mutu Kualitas Pembangunan Manusia melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal yang secara tidak langsung berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat sendiri. Sebab DAK yang dikelola pemerintah daerah dengan baik dapat meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan paling tidak dapat mengurangi kerusakan infrastruktur pada daerah tersebut dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan berdampak pada IPM yang bagus.

Penelitian dari Wandira (2013) dan Maiharyanti (2010) menyatakan bahwasanya secara parsial Dana Alokasi Khusus ini berpengaruh positif terhadap Belanja modal. Sejalan dengan 2 penelitian lainnya, Oktora dan pontoh (2013) menyebutkan DAK dan Belanja Modal memiliki hubungan yang sangat erat. Harahap (2010) menunjukkan bahwa baik secara simultan dan parsial DAK ini berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Setyowati dan Yohana (2010), Mirza (2012 dan juga Christy dan Priyo (2009) menyimpulkan hasil bahwa Belanja Modal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Tetapi hal sebaliknya di kemukakan oleh Sumiyati (2011) dan Syahril (2011) secara parsial Belanja Modal tidak

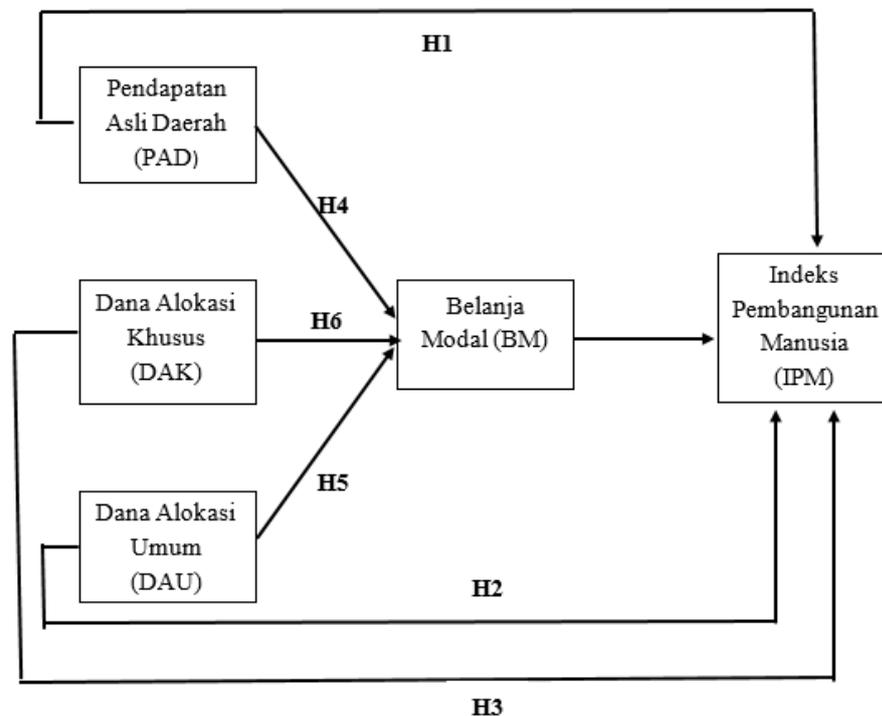
berpengaruh terhadap IPM. Maiharyanti (2010) dan Setyowati dan Yohana (2012) menyimpulkan bahwa DAK terbukti berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas memperlihatkan bahwasanya DAK ini secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Modal dan IPM. Apabila DAK yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerinah daerah tinggi, maka Belanja Modal tinggi karena DAK digunakan untuk membayai Belanja Modal. Dengan belanja modal yang tinggi, diharapkan akan meningkatkan IPM didaerah tersebut. sehingga diharapkan bahwasanya variabel DAK dapat secara signifikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H6: Belanja Modal Memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan review literatur yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini adalah pengujian secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia baik secara langsung maupun melalui Belanja Modal sebagai pemediasi. Berikut kerangka penelitian dalam penelitian ini :



Gambar2.1 Rerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian hipotesis baik hubungan langsung (*direct effect*) maupun hubungan tidak langsung (*indirect effect*) maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Indeks Pembangunan Manusia belum tentu mengalami kenaikan. Hipotesis pertama ditolak.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka semakin meningkat Indeks Pembangunan Manusia. Hipotesis kedua diterima.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya semakin besar Dana Alokasi Khusus maka semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia. Hipotesis ketiga diterima.
4. Belanja Modal tidak terbukti menjadi mediasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hipotesis keempat ditolak

5. Belanja Modal tidak terbukti menjadi mediasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hipotesis kelima ditolak
6. Belanja Modal tidak terbukti menjadi mediasi hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hipotesis keenam diterima.
7. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal sebesar 14,4 % sedangkan sisanya 85,6 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman atas pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan ketika menggunakan pendapatan daerah dengan bijaksana. Sebaiknya setiap pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan jumlah Pendapatan Asli Daerah di daerahnya dan mengalokasikan untuk Belanja Modal yang berhubungan dengan pelayanan publik yang benar-benar dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan manusia, sehingga dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Peneliti agak sulit mencari laporan keuangan pemerintah daerah di website pemerintah daerah masing-masing. Peneliti kadang harus mencari data laporan keuangan pemerintah daerah ke website Kemendagri.
2. Peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat karena keterbatasan waktu yang peneliti miliki.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diberikan saran sebagai berikut

1. Sebaiknya laporan keuangan pemerintah daerah tersedia di website semua pemerintah daerah agar penelitian mengenai pemerintah daerah efektif dan efisien.
2. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan pengalokasian PAD untuk kualitas pembangunan masyarakat daerah tersebut.
3. Sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan anggaran untuk pembangunan masyarakat daerah tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya:
 1. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain di luar model penelitian seperti variabel pertumbuhan ekonomi (Siswandi, 2015).
 2. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sampel seluruh kabupaten/kota se-Pulau Sumatera agar hasil penelitian lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Ed.1. Yogyakarta: ANDI.
- Adiputera, I Made Pradana et al. 2014. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.

- Anggraini, RA Dan Muta'ali, Luthfi. (2013). Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007- 2011. *Jurnal Bumi Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Vol.2, No.3*
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih.2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Lombok: *SNA 17 Mataram*, Lombok.
- Arikunto S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya, 2015-2017. <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
- Bhakti, Nadia Ayu. Istiqomah Dan Suprpto. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. Universitas Jenderal Soedirman, Vol.18, No.4. Purwokerto*.
- Brassard, C. 2008. Decentralization, Democratization, and Development in Bhutan. *Working Paper, February, Lee Kuan Yew School of Public Policy*, National University of Singapore.
- Brata, A.G. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian-Universitas Atma Jaya.
- Christy, Fhino Andrea dn Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS*, Surabaya.
- Darise, Nurlan, 2009 *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan BLU*, Indeks, Jakarta.
- Darmayasa, 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Dewi, Putu Ayu Krisna Dan Sutrisna, I Ketut. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana Bali, Vol.4, No.1. Bali.

- Eren, Mirac dkk. 2014. Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index: A Comparison of Regression Model for Limited Dependend Variables. *Canadian Center of Sciences and Education, Volume: 6, No.1. E-ISSN: 1918-7181. ISSN: 1918-7173.*
- Fruin, Mark dkk. 2013. Income Elasticity of Human Development in ASEAN Countries. *The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, Volume: 2, No.4. ISSN: 2286-7147.*
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Riva Ubar. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bgai Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol 11 No. 1 Maret 2011.
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm:Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Sturcture. *Journal of Financial Economics 3:* 305-360.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013.*
- Kusnandar & Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV.*
- Latuconsina, Zulfikar MY. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan Dan Regresi Panel. *Journal Of Regional And Rural Development Planning. Institut Pertanian Bogor, Vol.1, No.2*
- Lugastoro, Dectra Pitron. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.*(Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Maiharyati, Eva. 2010. *“Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan manusia dan Belanja Modal sebagai variabel Intervening*

pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam".
Skripsi. Medan: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.

- Marhaeni, Harmawanti; Sri Yati dan Bambang Tribudhi M. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, September 2012.
- Oktora, F. E. dan Wilson. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Tolitoli Sulawesi Tengah. *Journal Accountability*. Vol.2. N.1, Juni 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Raviyanti, Ayu Aldi. 2017. Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Manajemen/Volume XXII*, No. 02, 243-256.
- Republik Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Pratowo, Nur Isa. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia. Universitas Sebelas Maret. Vol.1, No.2*.
- Sari, Ida Ayu Candra Y dan Supadmi Ni Luh. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Vol.15.3
- Scott, William R. 2011. *Financial Accounting Theory*, 6th Edition, USA: Prentice Hall.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi* Vol. 9 No. 1.
- Siswandi. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal. *Jurnal Assets*. Vol. 5. No. 2:1-12.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Sularso, Sri. 2003. *Buku Perlengkapan Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Perlengkapan Replikasi*, BPFE-Yogyakarta.
- Sumardjoko, Imam. 2013. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Lomnbok.
- Sumiyati, E. E. 2011. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No.1.
- Syahril. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusiapada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Yogyakarta: *Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan*.
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C. 2011. *Economic Development*. Eleventh Edition. United States: Addison Wesley.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeran.
- UNDP. 2004. Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.undp.or.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
- Wandira Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal.1 (3): 45-5*.
- Yuliani, T., dan Saragih, N. 2014. Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics dan Policy*, Volume: 7, No.1. ISSN: 1979-715